

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan mata uang dolar mendominasi dunia pasca Perang Dunia II dapat ditelusuri kembali ke peristiwa dan perjanjian penting, seperti pada peristiwa *Marshall Plan* saat Amerika Serikat memberikan dolar untuk membantu negara-negara Eropa memperbaiki negaranya pada pasca perang dan Perjanjian *Bretton Woods* saat penggunaan mata uang dolar terikat dengan emas. Hal ini semakin memperkuat peran dolar sebagai mata uang cadangan yang dominan. Namun, perjanjian *Bretton Woods* menghadapi tantangan pada tahun 1960-an ketika dolar yang beredar di seluruh dunia melebihi cadangan emas AS, standar emas menjadi sulit dipertahankan karena pemerintah menetapkan harga emas AS sebesar \$35 dolar AS per ons dengan keterbatasan jumlah emas di dunia yang akan merugikan pemerintah jika emas dibeli dengan harga murah (Shepherdess, 2023).

Sepuluh tahun kemudian, Presiden AS Richard Nixon berusaha menurunkan nilai dolar dan mengakhiri pertukaran mata uang yang menyesuaikan cadangan emas, kemudian membuat dolar beralih ke sistem nilai tukar mengambang (Wibisono, 2019). Nilai tukar mata uang mengambang memiliki konvertibilitas tinggi (mata uang yang dapat digunakan sebagai nilai tukar dengan mata uang lainnya) dengan mudah ditukarkan di pasar dunia, berbeda dengan mata uang yang memiliki konvertibilitas rendah lebih sulit ditukarkan karena produksi mata uang terbatas (M. J. E. Greene & Isard, 1991). Dolar yang digunakan sebagai

mata uang cadangan global dan memiliki status sebagai mata uang mengambang bebas, yang berarti nilainya ditentukan oleh pasar tanpa intervensi pemerintah secara langsung.

Perkembangan dominasi dolar AS terhadap perekonomian dunia berlanjut pada tahun 2000 hingga saat ini yang juga disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya terbentuk sistem Petrodolar. Sistem Petrodollar merupakan sistem yang mengharuskan negara-negara menukar mata uang lokalnya dengan dolar AS sebelum melakukan transaksi seperti membeli minyak atau lainnya, hal ini telah menjadi faktor penting dalam menjaga nilai dolar (Shepherdess, 2023). Sistem ini telah berkontribusi terhadap hampir dua pertiga perekonomian internasional, menjadikan dolar AS sebagai mata uang cadangan bagi sebagian besar bank sentral di seluruh dunia.

Faktor dominasi lainnya adalah Spiral Utang nasional. Spiral Utang merupakan tindakan yang telah Amerika Serikat lakukan dengan mencetak dolar untuk menutupi utang yang terjadi sebelumnya. Spiral utang terjadi ketika suatu negara terus-menerus meminjam uang kepada negara lain untuk membayar utang yang ada, menciptakan siklus di mana utang terus meningkat (Winfree, 2024). Utang Amerika Serikat berada pada presentasi tinggi sejak Perang Dunia II, kemampuan meminjam uang merupakan hal penting dalam menghadapi perang, pandemi, resesi, dan kejadian buruk lainnya. Utang juga tidak mencerminkan tindakan buruk, sebaliknya utang dapat mencerminkan kekuatan suatu negara dalam pertahanan. Namun, jika pemerintah kehabisan kapasitas untuk meminjam, hal itu dapat mengancam kemampuan negara menciptakan inflasi dan suku bunga.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas dolar dan kemampuannya untuk mempertahankan status kekuatannya. Pada tahun 2023, spiral utang mencapai puncaknya pada tingkat inflasi yang bersejarah, yang coba dikendalikan oleh Pemerintah Federal melalui kenaikan suku bunga. Pemerintah Amerika Serikat mendapatkan \$4,4T yang bersumber dari pendapatan negara dan memiliki pengeluaran sebesar \$6,1T yang menyisakan defisit sebesar \$1,7T. Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa kekurangan ini disebabkan oleh fakta saat pandemi dan akan dipulihkan melalui pendapatan dari pajak. Namun, suku bunga yang lebih tinggi menjadikan pembayaran negara lain lebih mahal untuk melakukan bisnis dengan menggunakan dolar, sehingga berpotensi membuka jalan bagi peralihan dari dolar sebagai mata uang cadangan (Jiménez, 2023).

Para ahli telah menyelidiki secara menyeluruh kekuatan mata uang dolar AS dari perspektif status mata uang internasional dolar. Sejak krisis keuangan global, banyak yang melakukan evaluasi peran dolar AS dalam ekonomi global dan kekuasaan dominasi Amerika Serikat, termasuk mengenai penggunaan dolar AS yang menyebar di dunia internasional itu membantu membangun hegemoni Amerika Serikat dan mengenai penggunaan dolar yang secara tidak langsung menegaskan pengaruh globalnya (Liu & Papa, 2022).

Beberapa profesor dari Cambridge University memberikan pendapat bahwa ketidakseimbangan ekonomi global dan krisis keuangan global 2007-2008 adalah kurangnya kerja sama mata uang alternatif lainnya selain dolar (Liu & Papa, 2022). Secara historis, pembentukan mata uang dominan dan transisi dari satu mata uang

dominan ke mata uang dominan lainnya tidak terjadi sebagai hasil dari upaya sepihak atau kolektif yang dilakukan oleh negara-negara.

Dengan banyak faktor yang mempengaruhi penggunaan dolar dalam dunia internasional, membuat Tiongkok berupaya meninggalkan Standar Petrodollar. Melihat dari perkembangan perekonomian yang Tiongkok lakukan dalam organisasi perdagangan BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan), organisasi ini berusaha memperkuat ekonomi negara dengan bentuk kerjasama dan transaksi menggunakan mata uang nasional. BRICS memiliki kegiatan rutin melaksanakan KTT yang memiliki fokus pembahasan untuk mengembangkan dan memfokuskan pada ekonomi global (Idris et al., 2022).

BRICS juga mulai melakukan tindakan penggunaan mata uang nasional sebagai alat transaksi ke sesama anggota organisasi yang menyebabkan mempengaruhi lemahnya posisi dolar sebagai mata uang cadangan di area lingkup perdagangan internasional negara-negara yang terlibat. Meskipun terdapat tantangan dalam menggunakan sistem transaksi ini karena nilai dolar tidak berubah dalam pasar, penggunaan dolar AS tetap menjadi mata uang dominan dalam perdagangan dan keuangan Internasional (Norrlof, 2023). Dengan sekitar setengah dari seluruh perdagangan internasional ditagih dalam dolar AS dan setengah dari seluruh pinjaman internasional dan surat utang global berdenominasi dalam dolar.

Dolar AS tetap menjadi mata uang cadangan utama dunia, yang dipegang oleh pemerintah di seluruh dunia untuk digunakan dalam transaksi internasional. Pada tahun 2022, bank sentral menyimpan sekitar 59% cadangan mereka dalam dolar AS, menurut International Monetary Fund (IMF) (Best, 2021). Tiongkok dan

Amerika Serikat dianggap sebagai negara superpower utama di masa sekarang, kedua negara ini memiliki pengaruh besar terutama dalam bidang Ekonomi yang besar dalam tingkat global. Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar telah memainkan peran penting dalam perdagangan Internasional, investasi, dan kebijakan moneter. Sementara Tiongkok telah menjadi kekuatan baru dalam bidang ekonomi yang semakin dominan, juga telah menjadi produsen terbesar dan mitra perdagangan utama bagi banyak negara.

Tiongkok dan Amerika Serikat memiliki perbedaan masa dalam perkembangan ekonomi negaranya, perekonomian Amerika Serikat mulai berkembang sejak abad-19, sedangkan Tiongkok baru mengembangkan sayapnya pada akhir abad-20 hampir menuju masa abad-21. Tiongkok mengalami perkembangan ekonomi yang melonjak tinggi pada masa pemerintahan Mao Zedong, saat dimana Tiongkok sebagai negara dinasti kerajaan yang juga dikenal dengan negara peradaban tertua di dunia itu mulai terbuka pada dunia internasional dan mulai merintis kerjasama dengan negara lain (Wishanti, 2014).

Mao Zedong memimpin hingga pada kematiannya tahun 1976, Deng Xiaoping muncul menjadi pemimpin baru menggantikan Mao dengan membawa reformasi ekonomi baru yang membuka diplomasi dagang dan budaya kepada negara barat, hingga mulai memberikan jalan kepada investor pihak negara lain untuk masuk dalam pembentukan ekonomi negara. Kehadiran Deng Xiaoping melanjutkan pemerintahan Mao semakin membawa Tiongkok lebih maju hingga mampu menghadapi kemiskinan negara (Laurenceson 2018).

Xi Jinping berusaha menempatkan diri sebagai pusat negara dengan membawa resolusi dan partai besar, berbeda dengan presiden sebelumnya yang menggunakan resolusi untuk memperbaiki negara dari kekacauan masa lalu. Pada masa Deng Xiaoping lebih melakukan kritik kesalahan yang dilakukan Mao Zedong dan memperbaiki hal tersebut, sedangkan Xi Jinping dengan resolusi *modernnya* ingin membawa Tiongkok menjadikan negara kuat yang belum pernah terjadi selama beberapa pemerintahan lalu (Waiyee, 2021). Seperti mulai meningkatkan industri negara yang akan menjadi langkah awal untuk membuat Tiongkok menjadi negara dengan perekonomian besar.

Tiongkok dan Amerika memiliki hubungan baik yang terjalin sejak masa pemerintahan Deng Xiaoping yang mulai membuka diri menerima investor asing, termasuk Amerika. Hubungan baik terus terjalin dan berkembang menjadi mitra dagang ekspor impor barang, seperti teknologi dan pangan (Muslim, 2023). Peluang perekonomian Tiongkok untuk menjadi negara ekonomi global meningkat ketika presiden Barack Obama memimpin Amerika Serikat membuat sebuah kebijakan *Pivot to Asia* yang bertujuan agar menyeimbangkan kebijakan AS dalam alokasi sumber daya Amerika di Asia-Pasifik (Wardhana, 2018).

Ikatan hubungan yang dilakukan Obama mendapatkan respon baik dari Tiongkok, terlihat dengan adanya Panda Diplomacy yang terjalin oleh kedua negara tersebut dan berlangsung hingga akhir masa pemerintahan Obama. Strategi yang dilakukan Obama menunjukkan bahwa posisi Amerika saat ini berusaha memperbaiki citra negara dan reputasi pasca peristiwa War of Terrorism. Secara garis besar, Obama memberikan fokus kebijakan kepada seluruh negara dikawasan

Asia-Pasifik. Namun posisi Tiongkok pada saat itu yang lebih dominan mempunyai kekuatan ekonomi besar dalam kawasan tersebut, membuat Amerika memberikan perhatian lebih kepada Tiongkok karena posisi Tiongkok mampu memberikan bantuan bidang ekonomi lebih besar dikawasan Asia-Pasifik menggantikan Jepang sebagai aliansi Amerika.

Perkembangan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat, yang merasa tersaingi dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, teknologi, dan militer. Meskipun Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, dengan angka 4,6% pada kuartal III 2024 yang merupakan yang terendah dalam satu setengah tahun (Luc, 2024), negara ini tetap merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan Tiongkok akan mencapai sekitar 5% pada tahun 2024, pertumbuhan kelas menengah yang signifikan di Tiongkok juga memberikan kekuatan konsumsi yang dapat mempengaruhi pasar global (Reuters, 2024).

Hubungan kedua negara berubah saat akhir tahun 2018 pada awal masa presiden Donald Trump yang memiliki kebijakan berbeda dan melihat Tiongkok adalah ancaman. Trump melihat perkembangan ekonomi Tiongkok tidak wajar sebagai negara berkembang dan mulai melakukan *dumping* menaikkan pajak pada barang dagang yang beredar di Amerika, bahkan Trump melarang perdagangan bebas produk Tiongkok di Amerika Serikat (Muslim, 2023).

Amerika Serikat menerapkan kebijakan proteksionisme yang menduga Tiongkok melakukan kecurangan terhadap pasar dan pencurian kekayaan intelektual dengan peningkatan ekonomi yang tinggi yang merugikan

perekonomian Amerika, mencakup pengenaan tarif tinggi pada barang-barang impor dari Tiongkok. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan dengan Tiongkok dan melindungi industri domestik agar tidak kalah bersaing. Pengenaan tarif hingga 25% pada produk Tiongkok menyebabkan penurunan ekspor Tiongkok ke AS dan memperburuk hubungan bilateral (Sitorus D., 2021).

Sebagai respons terhadap kebijakan tarif AS, Tiongkok juga menerapkan kenaikan tarif balasan 15-25% terhadap barang-barang AS. Ini menciptakan siklus saling balas yang memperburuk ketegangan ekonomi antara kedua negara. Meskipun Tiongkok berusaha untuk membuka pasar dan menarik investasi asing, kebijakan Amerika tetap menjadi tantangan besar bagi pertumbuhan ekonomi Tiongkok (Kurniawan, 2024). Tiongkok sebagai negara berkembang merasakan kerugian besar dan memilih untuk memberikan perlakuan yang sama seperti Amerika Serikat, dengan memberikan sanksi menaikkan harga pajak Amerika yang membuat kerenggangan hubungan kedua negara.

Amerika Serikat memberikan pernyataan bahwa Tiongkok melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai salah satu penyebab utama terjadinya perang dagang. AS menuduh Tiongkok secara sistematis mencuri kekayaan intelektual dari perusahaan-perusahaan AS. Direktur Intelijen Nasional AS, John Ratcliffe, mengklaim bahwa Tiongkok mencuri kekayaan intelektual senilai sekitar 500M dolar AS setiap tahun, yang mencakup teknologi dan rahasia dagang dari berbagai sektor industri (BBC, 2020). Tuduhan ini menyoroti kekhawatiran bahwa Tiongkok tidak hanya meniru produk, tetapi juga

mengembangkan strategi untuk mendominasi pasar global dengan menggunakan teknologi yang dicuri.

Dugaan pelanggaran Tiongkok berdampak mengurangi keuntungan dan peluang bagi perusahaan-perusahaan AS di pasar Tiongkok. Produk-produk yang diproduksi dengan meniru teknologi dan desain dari AS sering kali dijual dengan harga lebih rendah (Ramadhan; Wiranata, 2016). Ini menciptakan ketidakpuasan pihak industri AS yang merasa bahwa mereka tidak dapat bersaing secara adil di pasar global. Oleh karena itu, Donald Trump mengambil kebijakan kenaikan tarif bagi barang Tiongkok dan menjadi awal mula Perang Dagang.

Pada saat yang sama, ketergantungan Tiongkok pada dolar AS merupakan sumber utama ketegangan yang berpengaruh dalam ekonomi negara. Membuat Tiongkok memandang dolar sebagai sumber risiko dan kerentanan negara, mengingat potensi ancaman yang ditimbulkan dari sanksi yang diberikan Amerika Serikat. Terhitung dalam sepuluh tahun terakhir, Tiongkok mulai memperkenalkan mata uang Renminbi dalam lingkup perdagangan internasional agar mengurangi ketergantungan.

Terlihat dalam penelitian Logan Wright, Agatha Kratz, Charlie Vest dan Matt Mingey yang membahas *Retaliation and Resistance Chinas Economic Statecraft in Taiwan Crisis*, penulis mengetahui bahwa terdapat representasi penggunaan Renminbi sebagai cadangan devisa pada transaksi internasional. Mata uang Tiongkok secara umum dianggap sebagai mata uang kelima yang paling umum digunakan di dunia bersamaan dengan Dolar AS, Euro, Yen Jepang dan Pound Sterling (Wright et al., 2024).

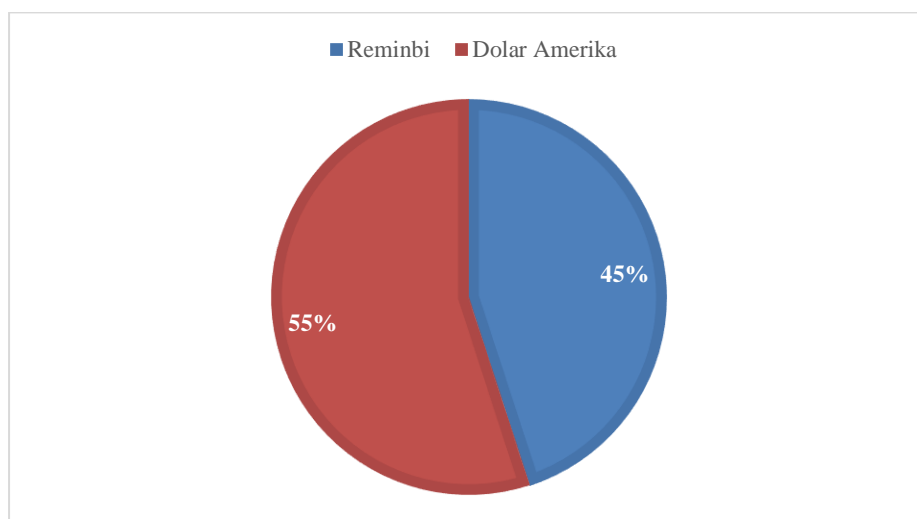
Penggunaan dolar AS dan Renminbi (RMB) dalam konteks perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki dampak signifikan terhadap dinamika perdagangan. Oleh karena itu, Tiongkok melakukan internasionalisasi Renminbi. Internasionalisasi renminbi (RMB) pada masa konflik perang dagang dengan Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi ekonomi dan geopolitik jangka panjang.

Perang dagang menunjukkan betapa besarnya pengaruh AS terhadap ekonomi global melalui dominasi dolar. Dengan semakin luasnya penggunaan RMB, Tiongkok dapat mengurangi risiko dari kebijakan ekonomi dan sanksi AS yang memanfaatkan dominasi dolar dalam sistem keuangan global. AS memiliki sejarah menggunakan dolar sebagai alat tekanan ekonomi terhadap negara lain melalui sanksi dan pembatasan perdagangan. Dengan meningkatkan penggunaan RMB dalam perdagangan internasional, Tiongkok dapat melindungi diri dari kemungkinan sanksi keuangan yang bisa menghambat akses Tiongkok ke pasar global.

Sebagian besar penggunaan transaksi internasional Renminbi hanya terjadi di daratan Tiongkok terutama Hong Kong yang berperan penting dalam penggunaan Renminbi karena menjadi salah satu gerbang utama tempat perdagangan internasional. Namun penggunaan Renminbi masih dominan terjadi dalam lingkup area dibawah kuasa Tiongkok, mencakup negara negara yang melakukan kerja sama dan memerlukan banyak perhatian, serta tindakan lebih untuk mampu mengurangi penggunaan dolar dalam lingkup yang lebih besar.

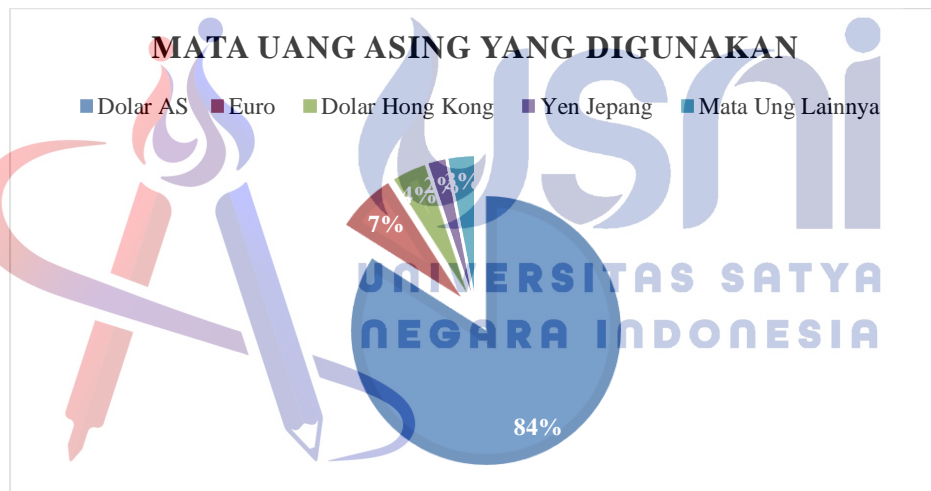
Selain Hong Kong, Beijing juga mengambil peran dalam upaya peningkatan penggunaan Renminbi. Berbeda dengan Hong Kong yang mengatur penggunaan Renminbi dalam transaksi perdagangan barang yang akan memasuki Tiongkok, Beijing mengambil peran melakukan dedolarisasi melalui pasar keuangan dan cadangan devisa negara. Beijing sedang berupaya menekankan pengurangan produk dan jasa yang terikat investasi cadangan negara dari dolar dan meningkatkan penggunaan renminbi dalam perdagangan dan keuangan (R. Greene, 2024).

Dalam dua dekade terakhir, Tiongkok memiliki nominal besar dalam menggunakan dolar, seperti dalam cadangan devisa dan hutang luar negeri. Pada akhir tahun 2023, total utang luar negeri Tiongkok tercatat kurang lebih sekitar 2,4 triliun dolar AS, yang setara dengan 13,6% dari PDB negara tersebut dan nominal ini masih berada dalam batas aman yang diakui secara internasional. Secara lebih rinci, sekitar 55% dari hutang luar negeri Tiongkok dalam mata uang asing, yaitu dolar AS, Euro, Yen, dan lain-lain. Sedangkan 45% dalam mata uang Renminbi (SAFE, 2023).



Gambar 1. 1 Diagram Penggunaan Mata Uang Dolar Yang Beredar di Tiongkok

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai jumlah mata uang dari hutang luar negeri dalam mata uang asing, terdiri dari Dolar AS 84-85%, Euro 7%, Dolar Hong Kong 4%, Yen Jepang 2% dan mata uang lain. Perhitungan hutang penggunaan dolar meningkat pada tahun 2024, yaitu sebesar 2,5 triliun dolar AS. Namun nominal ini tetap membuat perekonomian Tiongkok stabil karena dari hutang tersebut dialihkan untuk kepentingan negara dan berkontribusi sekitar 18-20% dari total PDB Tiongkok (CEIC, 2024).



Gambar 1. 2 Diagram Jumlah Mata Uang Asing Yang Digunakan di Tiongkok

Berdasarkan pada penjelasan diatas mengenai penggunaan dolar dan mata uang yang beredar di Tiongkok, hal ini berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam mengetahui kebijakan perdagangan apa saja yang akan mengurangi penggunaan dolar. Kondisi Tiongkok saat ini berada dalam keadaan bertahan dalam masa perang dagang dengan Amerika yang sangat mempengaruhi ekonomi Tiongkok. Dalam kebijakan perdagangan Tiongkok mengusahakan penggunaan

Renminbi dalam perdagangan internasional guna menjadi pertahanan dari tekanan ekonomi yang diberikan Amerika, terutama saat fase perang dagang berlangsung.

Menyadari bahwa untuk mampu bersaing berdagang demi mencapai tujuan mengurangi ketergantungan dolar AS agar mampu menjadi negara perekonomian terbesar tanpa merasa kekhawatiran terhadap dominasi dolar dan sanksi Amerika, Tiongkok membutuhkan berbagai kebijakan yang memungkinkan menjadi pendorong kemajuan negara. Perang dagang memiliki dampak bagi Tiongkok yang berkaitan dengan penggunaan Renminbi dan dominasi dolar dalam perdagangan internasional, yang juga berpengaruh pada pendapatan negara dan peredaran penggunaan mata uang.

Oleh karena itu, melihat kondisi tersebut penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bentuk kebijakan yang dilakukan Tiongkok dalam kebijakan luar negeri dan perdagangan internasional selama masa perang dagang dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump periode pertama tahun 2017-2021.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang sesuai yang telah di jelaskan diatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab sebuah pertanyaan yaitu “Bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok dalam mengurangi ketergantungan dolar AS pada Perang Dagang masa pemerintahan Presiden Donald Trump?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami lebih rinci mengenai kebijakan luar negeri yang dilakukan Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan dolar AS dalam studi kasus perang dagang dengan Amerika Serikat masa presiden Donald Trump, serta mengetahui seperti apa implementasi kebijakan yang dilakukan Tiongkok.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu di bidang Hubungan Internasional yang berkonsentrasi pada politik ekonomi. Dengan menganalisis fenomena tindakan yang dilakukan Tiongkok untuk mengupayakan mengurangi penggunaan mata uang dolar sebagai alat transaksi dalam perdagangan Tiongkok, terutama dalam kasus perang dagang dengan Amerika Serikat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian secara praktis ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para mahasiswa dan masyarakat luas mengenai upaya yang dilakukan suatu negara untuk memajukan negaranya sendiri di bidang ekonomi politik pada dunia internasional. Tiongkok sebagai pemangku kepentingan membentuk berbagai kebijakan dan kerja sama, serta berkontribusi dalam membangun perekonomian

dunia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan jurusan hubungan internasional di Universitas Satya Negara Indonesia

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pertama dari penulisan sistematika. Bab ini memiliki beberapa sub bagian. Yang pertama adalah sub bagian Rumusan Masalah yang menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikembangkan. Kedua, kumpulan pertanyaan penelitian yang merangkum informasi penelitian menjadi pertanyaan penelitian. Ketiga, tujuan penelitian memberikan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh penelitian. Keempat, manfaat penelitian dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini berisi dokumen-dokumen yang mendukung klaim penelitian. Bab ini diisi dengan kumpulan penelitian sejarah, landasan teori, kerangka teori, dan pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini membahas metode yang digunakan penulis untuk merancang penelitian. Bab ini memiliki beberapa sub bagian. Subkategori tersebut meliputi desain penelitian, metode penelitian, metode kajian, metode analisis, metode pengumpulan data, dan metode validasi data.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini berisi analisis dan argumentasi penulis mengenai masalah penelitian. Bab ini mencakup beberapa sub bagian yang disusun menurut garis besar gagasan yang disampaikan pada bab sebelumnya. Pada bab ini dilakukan pembahasan mengenai kebijakan perdagangan yang berkaitan dengan bab bab sebelumnya tentang bagaimana tindakan yang Tiongkok lakukan dalam masa perang dagang.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini, penulis meresmikan kesimpulan yang dianalisis pada bab sebelumnya dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

